

ANALYSIS OF THE IMPACT OF LOCAL REVENUE, CENTRAL GOVERNMENT TRANSFERS, AND UNSPENT BUDGET SURPLUS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT AND CITY GOVERNMENTS IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

Inayah Alainin^{1*}, Rahma Maulidia², dan Rusliyawati³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura

Email: b1031231150@student.untan.ac.id^{1*}, rahma.maulidia@ekonomi.untan.ac.id², dan rusliyawati@ekonomi.untan.ac.id³

*Corresponding author

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v10i2.5943>

Received: 24/05/2026, Revised: 25/06/2026, Accepted: 27/06/2026

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the impact of Local Own-Source Revenue (PAD), Central Government Transfers, and Unspent Budget Surplus (SiLPA) on the financial performance of the West Kalimantan Provincial Government for the years 2021–2025. This study employs a quantitative approach and utilizes secondary data obtained from the Budget Implementation Report (LRA) sourced from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Panel data from 14 regencies and cities were analyzed using the Fixed Effects Model (FEM) with EViews 14. The results indicate that local revenue (PAD) has a negative and significant impact on local government financial performance, while central government transfers have a positive and significant impact. SiLPA has a positive but insignificant impact. This study concludes that effective management of local revenue, optimization of central government transfer funds, and improved financial management quality are key factors for local government financial performance.

Keywords: Local Revenue, Central Government Transfers, Budget Surplus, Local Government Financial Performance

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DAN SiLPA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, serta SiLPA terhadap Kinerja keuangan pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2021–2025. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data panel dari 14 kabupaten dan kota dianalisis menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)* dengan EViews 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap situasi keuangan pemerintah daerah, sedangkan transfer pemerintah pusat memiliki dampak positif dan signifikan. SiLPA memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan penerimaan daerah yang efektif, optimalisasi penggunaan dana transfer pemerintah pusat, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci bagi Kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, SiLPA, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah adalah elemen krusial dalam menciptakan pemerintahan yang baik serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Umumnya, kebutuhan akan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah semakin bertambah seiring dengan seiring dengan berkembangnya konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan proses ketika pemerintah pusat menyalurkan sebagian sumber dananya kepada pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menekan ketimpangan fiskal, baik yang terjadi antara tingkat pemerintahan yang berbeda maupun antar pemerintah daerah (Anjelika et al., 2026). Desentralisasi fiskal ini pada hakikatnya merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan layanan kepada masyarakat (Saputra & Maryono, 2025). Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 serta UU Nomor 33 Tahun 2004, di mana kedua peraturan tersebut mengatur berbagai hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Putri et al., 2025).

Dalam situasi ini, hasil kinerja keuangan daerah merupakan hal yang krusial untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan cara yang efektif dan efisien. Di samping itu, kemampuan daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan memenuhi standar penilaian yang berlaku juga menjadi pertimbangan utama bagi pihak eksternal dalam menentukan keputusan investasi (Pratama et al., 2024). Dengan demikian, apabila pengelolaan kinerja keuangan dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan, maka pengendalian keuangan daerah akan berjalan lebih baik dari segi pengelolaan pemasukan dan pengeluaran daerah tersebut (Insani et al., 2023). PAD adalah sumber pemasukan yang didapat oleh pemerintah daerah dari berbagai elemen, termasuk pajak daerah, retribusi, dan sumber lain yang legal. Seluruh penerimaan tersebut dihimpun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Peningkatan PAD mencerminkan bahwa suatu daerah mempunyai tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik, sehingga ketergantungan terhadap dana yang ditransfer pemerintah pusat berkurang (Yahya, 2022). Dana transfer dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendukung pembiayaan serta memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi (Octolongerens & Hukom, 2024). Selain PAD dan transfer pemerintah pusat, SiLPA juga menjadi bagian dalam pengelolaan keuangan daerah. Akumulasi SiLPA yang besar dapat menjadi indikasi bahwa perencanaan serta realisasi anggaran belum berjalan secara efektif. Hal ini bisa terlihat dari adanya keterlambatan dalam pelaksanaan belanja, kegiatan yang belum terealisasi, serta terbatasnya kapasitas fiskal daerah dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran (Putri et al., 2025).

Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Komposisi pendapatan daerah cenderung lebih bergantung pada dana transfer dibandingkan kontribusi pendapatan asli daerah. Data dari DJPK mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 realisasi penerimaan dana transfer mencapai sekitar Rp13,27 triliun, sedangkan PAD hanya sebesar Rp3,47 triliun. Selain itu, pemerintah pusat juga merencanakan penurunan dana transfer ke daerah sebesar Rp522 miliar pada tahun 2026, yang berpotensi mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, nilai SiLPA di Kalimantan Barat masih tergolong tinggi, yaitu mencapai sekitar Rp3 triliun hingga Rp3,4 triliun pada tahun 2025–2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah, alokasi dari pemerintah pusat, dan SiLPA merupakan elemen krusial yang dapat memberikan dampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai pengaruh PAD, transfer pemerintah pusat, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memperlihatkan temuan yang tidak konsisten. Menurut (Sembiring et al., 2025) dan (Bintang et al., 2024), PAD memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tetapi dalam temuan (Ratnasari & Meirini, 2022) dan (Djuniar & Zuraida, 2018) justru ditemukan jika PAD tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu (Putri et al., 2025) menemukan bahwa transfer pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian (Fitriani & Syarif, 2025) dan (Gunawan et al., 2024) menyatakan bahwa SiLPA memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan, namun dalam studi yang dilakukan oleh (Putri & Ratnawati, 2023) ditemukan temuan yang sebaliknya, yaitu memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik.

Perbedaan hasil temuan tersebut mengindikasikan kesenjangan penelitian yang menjadi dasar urgensi dilakukannya penelitian ini, khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Relevansi penelitian ini sangat tinggi mengingat pentingnya kinerja keuangan daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh PAD, transfer pemerintah pusat, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021-2025. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan untuk membuat strategi guna meningkatkan kinerja keuangan daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa manajer bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang termotivasi untuk mencapai keberhasilan bersama, bukan dengan motivasi finansial atau kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini melihat manajer atau pemimpin organisasi tidak hanya sebagai pihak yang berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi sebagai pengelola yang mengutamakan kepentingan pemilik, para pemangku kepentingan, serta menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang (Amanda & Kesuma, 2025). *Stewardship Theory* relevan digunakan dalam penelitian ini karena variabel PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan SiLPA mencerminkan pengelolaan sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintahan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa berhasil pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hal ini mencakup kemampuan pemerintahan daerah dalam mengumpulkan pendapatan dan mengalokasikannya secara efektif untuk membiayai pelaksanaan tata kelola dan pembangunan daerah. Beberapa rasio digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja keuangan daerah, salah satunya adalah Rasio Efisiensi PAD yang dipakai untuk mengukur potensi pemerintah daerah guna menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan di bawah kewenangannya sesuai dengan target yang direncanakan. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah (Halim, 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UUU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset milik daerah yang telah dipisahkan, serta penerimaan lain yang sah yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan ini bertujuan untuk menyediakan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi. Sejalan dengan otonomi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, ketergantungan pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat perlu dikurangi sehingga kemandirian pembiayaan daerah dapat tercapai, sehingga optimalisasi PAD menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah (Bintang et al., 2024).

Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Transfer ke Daerah didefinisikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam kerangka desentralisasi. Berbagai instrumen transfer yang tersedia meliputi dana pemerataan, bantuan insentif untuk pemerintah daerah, alokasi dana otonomi khusus, dana desa, dan mekanisme transfer lainnya yang pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen penyeimbang fiskal antar daerah (Anjelika et al., 2026). ketergantungan banyak daerah terhadap transfer masih relatif tinggi, terutama bagi wilayah yang tingkat kemandirian fiskalnya belum memadai (Arafah & Najamuddin, 2023).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 SiLPA diartikan sebagai selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja dalam suatu periode anggaran, yang mengindikasikan masih adanya dana yang belum terpakai. Sementara itu, Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa SiLPA dapat bersumber dari penambahan PAD, peningkatan dana transfer, penerimaan sah lainnya, tambahan pembiayaan, efisiensi pada sisi belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan hingga akhir tahun anggaran, serta sisa anggaran akibat tidak tercapainya target kinerja maupun sisa dari pengeluaran yang telah dibiayai.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah karena tingginya kontribusi PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat (Syafelina & Arza, 2025). Berdasarkan Teori *Stewardship*, pemerintah daerah sebagai pengelola berkewajiban mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah, termasuk PAD, guna mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan PAD menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal, sehingga memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Kurniawati, 2025), (Putra et al., 2024), dan juga (Putri et al., 2025)

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Inayah Alainin, Rahma Maulidia, dan Rusliyawati)

membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris tersebut, hipotesis pertama penelitian ini dirumuskan adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

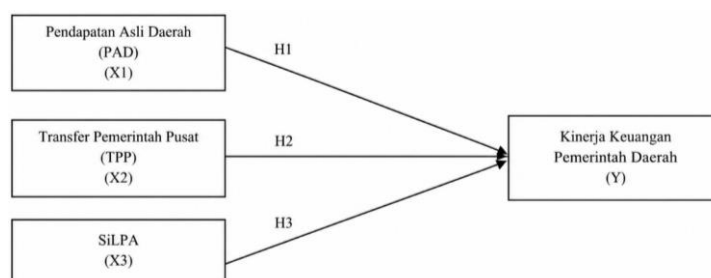
Transfer pemerintah pusat memberikan tambahan sumber daya fiskal yang diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai steward untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan membiayai program pembangunan. Namun, berdasarkan hasil temuan penelitian oleh (Sembiring et al., 2025) dan (Putri et al., 2025) mengindikasikan bahwa dana transfer memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan adanya fenomena ketergantungan fiskal. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, ketergantungan berlebihan terhadap transfer mencerminkan lemahnya kapasitas steward dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingginya SiLPA mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran yang disebabkan oleh lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, kondisi ini bukan tanda keberhasilan, melainkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Nilai SiLPA yang tinggi menunjukkan bahwa dana publik tidak digunakan secara optimal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan, yang berdampak negatif pada kinerja keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Meirini, 2022) dan (Mawardiati & Hasbi, 2025) menunjukkan bahwa tingginya akumulasi SiLPA mencerminkan pengelolaan anggaran yang kurang efektif sehingga dapat menurunkan rasio kinerja keuangan. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal asosiatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2013). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menguji pengaruh PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan SiLPA pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana sampel yang digunakan adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2025. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang didapatkan dari LRA yang dilaporkan di situs resmi DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id). Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yang berarti mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data dari laporan keuangan pemerintah daerah. Data panel terdiri dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021-2025. Data diproses dengan Eviews 14 dan menggunakan berbagai metode analisis seperti statistik deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KK_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 TPP_{it} + \beta_3 SiLPA_{it} + \varepsilon_{it} \tag{1}$$

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Kinerja Keuangan (Y)	Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio	(Halim, 2012)
Pendapatan Asli Daerah (X1)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-Lain	Rasio	(Undang-Undang Nomor 33 Tahun

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
	Pendapatan Asli Daerah yang sah		2004)
Transfer Pemerintah Pusat (X2)	Transfer Pemerintah Pusat = dana perimbangan + dana insentif daerah + dana otonomi khusus + dana keistimewaan + dana desa + bentuk transfer lainnya	Rasio	(Anjelika, Ginting dan Sriekaningsih, 2026)
SiLPA (X3)	SiLPA = Surplus/defisit + jumlah pembiayaan netto	Rasio	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	4.866288	6.956255	4.073366	4.604797
Median	4.993489	6.907225	4.074312	4.615900
Maximum	6.647468	7.684131	6.234685	4.761300
Minimum	3.538347	6.399942	1.764731	4.453900
Std. Dev.	0.742051	0.367213	1.099037	0.063289
Observations	67	67	67	67

Sumber: Data Olahan (2026)

Menurut hasil Tabel 2, variabel PAD (X1) memiliki rata-rata 4,866 dengan standar deviasi 0,742, nilai minimumnya adalah 3,538, dan nilai maksimumnya adalah 6,647. Variabel transfer pemerintah pusat (X2) memiliki rata-rata 6,956 dengan standar deviasi 0,367, nilai minimumnya adalah 6,399, dan nilai maksimumnya adalah 7,681. Variabel SiLPA (X3) memiliki rata-rata 4,073 dengan standar deviasi 1,099, nilai minimumnya adalah 1,764, dan nilai maksimumnya adalah 6,234.

Pemilihan Model Panel

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.167629	(13,50)	0.0016
Cross-section Chi-square	40.253839	13	0.0001

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada tabel 3, nilai probabilitas Cross-section Chisquare sebesar $0,0001 < 0,05$. Oleh karena itu, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)* dipilih dan analisis dilanjutkan dengan uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.294245	3	0.0000

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, nilai probabilitas yaitu $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu, model yang diterapkan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*

Regresi Data Panel *Fixed Effect Model (FEM)*

Tabel 5. Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.965023	0.424237	6.989072	0.0000
X1	-0.135290	0.036012	-3.756823	0.0005
X2	0.324787	0.066725	4.867585	0.0000
X3	0.009533	0.010493	0.908521	0.3680

Sumber: Data Olahan (2026)

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Inayah Alainin, Rahma Maulidia, dan Rusliyawati)

Berdasarkan tabel 5, persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$KK = 2,965023 - 0,135290 \text{ PAD} + 0,324787 \text{ TPP} + 0,009533 \text{ SiLPA} + \varepsilon \quad (2)$$

Dari hasil persamaan tersebut, dapat dijelaskan: (1) Nilai konstanta 2,965023 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen (PAD, TPP, SiLPA) bernilai 0, maka rata-rata nilai variabel dependen diperkirakan sebesar 2,965023. (2) Koefisien X1 (PAD) sebesar $-0,135290$ mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan PAD diperkirakan akan menyebabkan penurunan nilai variabel dependen sebesar 0,135290. (3) Koefisien X2 (TPP) sebesar 0,324787 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan TPP, diprediksi akan meningkatkan nilai variabel dependen sebesar 0,324787. (4) Koefisien X3 (SiLPA) sebesar 0,009533 menunjukkan jika setiap peningkatan satu satuan SiLPA diperkirakan mengalami menaikkan nilai variabel dependen yaitu 0,009533.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai	Prob. / Signifikansi
Jarque-Bera	0.148512	
Probability	0.928434	> 0.05
Skewness	0.060062	
Kurtosis	2.803103	
Observasi	67	

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 6 di atas, nilai Jarque-Bera sebesar 0,1485 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9284. Karena nilai probabilitas (0,9284) lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%), maka H_0 diterima, yang berarti residual dari model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.179977	4938.929	NA
X1	0.001297	844.1443	1.387565
X2	0.004452	5913.257	1.213652
X3	0.000110	51.30083	1.166390

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7, nilai Centered VIF untuk variabel X1 1.387565, X2 1.213652, dan X3 1.166390. Semua hasil Centered VIF kurang dari 10 mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, sehingga asumsi bebas multikolinearitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.034079	0.193894	0.175763	0.8612
X1	0.031380	0.016459	1.906555	0.0623
X2	-0.019599	0.030496	-0.642672	0.5234
X3	-0.003985	0.004796	-0.830997	0.4099

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan tabel 8, nilai probabilitas variabel X1 0.0623, X2 0.5234, serta X3 0.4099. Semua hasil probabilitas $> 0,05$ yang mengindikasikan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Autokorelasi

R-squared	0.53823	Mean dependent var	4.604797
Adjusted R-squared	0.39044	S.D. dependent var	0.063289
S.E. of regression	0.04942	Akaike info criterion	-2.962467
Sum squared resid	0.12206	Schwarz criterion	-2.403068
Log likelihood	116.247	Hannan-Quinn criter	-2.741112

F-statistic	3.64234	Durbin-Waston stat	1.745795
Prob(F-statistic)	0.00021		

Sumber: Data Olahan (2026)

Hasil uji yang menggunakan Durbin-Watson menunjukkan nilai 1,746 pada jumlah observasi 67 dan 3 variabel independen dengan tingkat signifikan 0,05, diperoleh nilai dU sebesar 1,696. Karena nilai Durbin-Watson berada pada rentang $dU < DW < (4-dU)$, yakni $1,696 < 1,746 < 2,304$, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji pada tabel 5 mengindikasikan bahwa variabel X1 memperoleh nilai koefisien -0,135290 dengan probabilitas $0,0005 < 0,05$. Karena nilai koefisien negatif dan signifikan, maka H1 ditolak. Nilai koefisien variabel X2 0,324787 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$, maka H2 ditolak. Nilai Variabel X3 0,009533 dengan probabilitas $0,3680 > 0,05$, maka H3 dalam penelitian ini ditolak.

Uji f (Uji Simultan)

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai F-statistic 3,642334 dengan probabilitas $0,000231 < 0,05$. Oleh karena itu, H0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan jika PAD, TPP, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 9, nilai R-square 0,538223 atau 53,82%, dan nilai Adjusted R-squared 0,390454 atau 39,05%. Besarnya Adjusted R-squared mengindikasikan bahwa 39,05% perubahan kinerja keuangan pemerintah dapat diterangkan oleh variabel X1, X2, dan X3 dalam model, sementara itu sisa perhitungan 60,96% dipengaruhi oleh faktor yang tidak termasuk dalam model.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD justru cenderung menurunkan kinerja keuangan daerah, sehingga H1 ditolak. Temuan ini memperlihatkan jika peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dari perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah seharusnya mengelola sumber daya daerah secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan PAD tanpa diimbangi dengan pengelolaan secara efektif dapat menyebabkan ketidaktercapaian target pendapatan daerah secara optimal. Dengan demikian besarnya PAD tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Ratnasari & Meirini, 2022), (Anjani et al., 2026) dan (Aryasandi & Akbar, 2024) yang menemukan bahwa PAD tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum tentu diiringi oleh peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Pengujian yang telah dilakukan memberikan hasil jika Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan transfer pemerintah pusat cenderung meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah masih menjadi salah satu sumber pendanaan utama dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama dalam pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah sebagai steward memanfaatkan transfer pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih cukup bergantung pada transfer pusat dalam mendukung kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anjelika et al., 2026), (Aryasandi & Akbar, 2024), dan (Mawardiaty & Hasbi, 2025) yang menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Pengujian yang dilakukan memberikan hasil bahwa SiLPA memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini ditolak. SiLPA positif dapat terbentuk dari kelebihan realisasi PAD yang mencerminkan kinerja yang baik, tetapi juga dari rendahnya serapan belanja sehingga hubungan tersebut tidak konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Inayah Alainin, Rahma Maulidia, dan Rusliyawati)

SiLPA belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, SiLPA dapat mencerminkan adanya efisiensi anggaran ataupun keterlambatan penyerapan anggaran daerah. Namun, karena pengaruhnya tidak signifikan, SiLPA belum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Djuniar & Zuraida, 2018), (Putri & Ratnawati, 2023), dan (Mawardiati & Hasbi, 2025) yang menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan SiLPA berpengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan kota di Kalimantan Barat dari tahun 2021-2025. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa PAD tidak selalu memberikan peningkatan efisiensi manajemen keuangan pemerintah daerah karena PAD memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Transfer Pemerintah Pusat memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengindikasikan bahwa dana transfer masih menjadi pembiayaan penting untuk mendukung kapasitas keuangan pemerintah daerah. Semestara itu, SiLPA memiliki dampak yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga belum menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, serta SiLPA adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti ada faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum diteliti. Penelitian ini juga terbatas hanya pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021-2025, sehingga hasil yang didapatkan tidak bisa digeneralisasikan. Selain itu, karena penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan realisasi anggaran, faktor non-keuangan yang mungkin memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dimasukkan dalam analisis ini. Karena keterbatasan ini, penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah, memperbanyak variabel yang relevan dan menggunakan metode yang lebih mendalam untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, D., & Kesuma, S. A. (2025). A Systematic Literature Review On : Stewardship Theory (2020 – 2024). *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 4(12), 4290–4295.
- Anjani, Fithri, E. J., & Selvita, M. (2026). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 22(4), 792–806.
- Anjelika, D., Ginting, G., & Srikaningsih, A. (2026). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Terhadap Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 9(1), 650–665.
- Arafah, R., & Najamuddin, H. K. (2023). Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Transfer Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan. *Journal AK-99*, 3(2), 323–332.
- Aryasandi, F. I., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(10), 7030–7043. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3752>
- Bintang, M., Puspitasari, A., & Yantiana, N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Berajah Journal*, 4(4), 863-872.
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 141–157.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–65.
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *ECo-Fin*, 7(1), 334–348. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Gunawan, E., Ramli, M. R., Zulfan, T., Maisarah, & Sumidawati. (2024). Mengukur Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Aceh : Peran Varian Anggaran dan Silpa Tahun 2018-2022. *Sties*, 15(2), 12–22. <https://doi.org/10.36083/si-men.vxxix>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (empat). Salemba Empat.
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi*

- Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5377>
- Mawardiati, I., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal EMT KITA*, 9(2), 686–693.
- Pratama, D. P., Mustika, I. G., & Karpriana, A. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2022. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 8(4), 720–732. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1609>
- Putra, I. K., Rahayu, S., & Friyani, R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 516. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.1049>
- Putri, M. N. A., Sulaiman, & Hartaty, S. (2025). Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5308–5315. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.4877>
- Putri, O., Yantiana, N., & Desyana, G. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat 2019-2024. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2362–2384. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5860>
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 38–47. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>
- Saputra, A. D., & Kurniawati, L. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Digital Business*, 5(4), 1754–1774.
- Saputra, D., & Maryono. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2022-2024. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5069–5077. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.4896>
- Sembiring, R. T., Mustika, I. G., & Helmi, S. M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(2), 2863.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Syafelina, M., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7(4), 1839–1851.
- Vennus Octolongerens, & Hukom, A. (2024). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 52–75. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.521>
- Yahya, A. (2022). Peran Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dipengaruhi Oleh Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 7(01), 1–13.